

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ekonomi makro Provinsi Jambi adalah salah satu alat untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah yang dicerminkan antara lain sebagai berikut : Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Januari 2012 turun sebesar 61,12 persen, dari US\$ 217,20 juta pada Desember 2011 menjadi US\$ 84,46 juta pada Januari 2012. Penurunan nilai ekspor terjadi pada semua kelompok, Kelompok Pertanian turun 8,57 persen, Kelompok Industri turun 15,64 persen, dan Kelompok Pertambangan turun 92,91 persen. Sumbangsih terbesar kumulatif nilai ekspor berasal dari Kelompok Industri sebesar 64,74 persen, kemudian disusul Kelompok Pertambangan sebesar 32,94, dan Kelompok Pertanian yang paling rendah yaitu 2,32 persen. Jika dinilai secara kumulatif pada periode Januari-Desember 2011 dibanding dengan nilai kumulatif Januari-Desember 2010 mengalami peningkatan 60,18 persen. Kumulatif nilai ekspor Januari-Desember 2011 mencapai US\$ 2.383,56 juta dan periode yang sama tahun 2010 nilainya mencapai US\$ 1.488,06 juta.

Nilai ekspor Jambi Tahun 2011 didominasi oleh karet olahan sebesar US\$ 1.129,14 juta atau 47,37 persen dari total ekspor, kemudian pertambangan sebesar US\$ 632,96 juta atau 26,56 persen, sehingga nilai tambah (*added value*) dari komoditi ekspor ini masih relatif rendah. Kondisi ini tentunya berpengaruh rendahnya pada *multiplier effect* dari komoditi ekspor tersebut seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan harga komoditi dan tentunya penerimaan daerah juga berpengaruh. Kemudian dari sisi negara tujuan, ekspor Jambi mayoritas ke negara Singapura sebesar US\$ 492,14 juta atau 20,65 persen, kemudian Jepang sebesar US\$ 360,04 juta atau 15,11 persen dan Malaysia sebesar US\$ 307,40 juta atau 12,90 persen. Hal ini menunjukkan

ketergantungan ekspor Jambi ke Singapura dan Jepang cukup tinggi, dan karakteristik dari kedua negara tersebut adalah membeli komoditi primer atau bahan mentah dan sebagian bahan setengah jadi, dan kedua negara tersebut akan mengolahnya kembali untuk di ekspor kembali ke Indonesia termasuk Jambi dalam bentuk barang jadi. Ekspor Jambi sebesar US\$ 1.396,82 juta atau 58,69 persen melalui Pelabuhan Talang Duku, kemudian US\$ 747,46 juta atau 31,36 persen melalui Pelabuhan Muara Sabak dan Pelabuhan Kuala Tungkal hanya sebesar US\$ 237,28 juta atau 9,95 persen.

Selanjutnya bila dilihat dari Impor Jambi menurut kelompok komoditi dengan nilai kumulatif 2011 didominasi oleh mesin dan alat angkutan sebesar US\$ 127,62 juta atau 71,21 persen, bahan kimia dan sejenisnya sebesar 21,57 juta atau 12,03 persen dan hasil industri lainnya sebesar US\$ 19,03 juta atau 10,61 persen serta bahan makanan dan sejenisnya sebesar US\$ 9,01 juta atau 5,02 persen. Salah satu yang menjadi keprihatinan kita kedepan adalah meningkatnya impor bahan makanan dan sejenisnya yang dapat mengancam permintaan terhadap bahan makanan produk lokal termasuk dari Jambi, karena produk lokal tersebut kalah bersaing dari sisi kualitas dan harga, sehingga konsumen lebih menyukai produk makanan dari impor. Oleh karena dalam mewujudkan Jambi Emas 2015, sektor pertanian harus menjadi basis pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditi dari sektor pertanian tersebut yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pangsa impor Provinsi Jambi menurut negara asal utama sampai Juni 2010 didominasi oleh Negara Singapura sebesar US\$ 70,82 juta atau 39,50 juta, Cina sebesar US\$ 43,92 juta atau 24,50 persen dan Malaysia sebesar US\$ 21,88 juta atau 12,20 persen. Berdasarkan selisih ekspor dan impor tersebut, maka Provinsi Jambi mengalami surplus neraca perdagangan kumulatif bulan Januari-Desember 2011 sebesar US\$ 2.204,25 juta, kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap ekspor-impor dari negara China, Singapura, Jepang, dan Malaysia relatif besar, perlu dilakukan strategi diversifikasi dan strategi

pengembangan pasar ekspor komoditi Provinsi Jambi, disamping yang lebih penting tentunya peningkatan nilai tambah dari komoditi ekspor tersebut.

Pada Bulan Desember 2011, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi naik dari 132,61 pada Bulan November 2010 menjadi 133,49 pada Bulan Desember 2011. Laju inflasi tahun kalender (Januari – Desember) 2011 dan laju inflasi *year on year* (Desember 2011 terhadap Desember 2010) masing-masing sebesar 2,76 persen. Inflasi terjadi pada enam kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,20 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,71 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 0,68 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,16 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,23 persen; serta Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,20 persen. Sedangkan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan tidak mengalami perubahan indeks. (BPS Provinsi Jambi).

Laju pertumbuhan kuartalan ($q-t-q$) PDRB Provinsi Jambi pada triwulan I-2012 diperkirakan tumbuh *moderate* dibandingkan Triwulan IV-2011. Pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi kontributor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan mendatang didukung oleh ekspor dan konsumsi nir laba. Dari sisi penawaran, kontribusi pertumbuhan ekonomi Jambi masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, dan industri pengolahan.

Perkembangan harga-harga pada triwulan mendatang diperkirakan mengalami peningkatan baik secara triwulanan ($q-t-q$) maupun tahunan ($y-o-y$) meskipun dengan angka yang relatif rendah. Dari sisi permintaan, meningkatnya permintaan akan perumahan serta adanya hari libur nasional menjadi faktor penyumbang inflasi Kota Jambi pada triwulan mendatang. Sementara itu di sisi penawaran, adanya kendala jalur distribusi akibat kondisi jalan yang belum baik serta musim hujan yang berlangsung di triwulan mendatang dapat

mengganggu kelancaran arus distribusi barang sehingga berpotensi meningkatkan angka inflasi. Namun demikian, berlangsungnya musim panen di triwulan mendatang dapat menahan tingginya laju inflasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan mendatang diperkirakan pada kisaran 0,75%-1,75 (*q-t-q*) tumbuh *moderate* dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan laporan yang mencapai 1,15%. Sementara itu, secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jambi diperkirakan berada di kisaran 7,25%-8,25% (*y-o-y*) relatif *moderate* dari triwulan laporan yang mencapai 7,86% (*y-o-y*).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan mendatang serta didukung oleh ekspor dan konsumsi nirlaba. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Domestik Bruto relatif menurun di triwulan mendatang. Kondisi ini juga didukung dari hasil SKDU triwulan IV-2011. Para responden masih optimis memandang perekonomian triwulan mendatang meskipun diperkirakan akan terjadi perlambatan. Hal ini tercermin dari masih positifnya angka total saldo bersih tertimbang perkembangan dunia usaha triwulan I-2012 meskipun mengalami penurunan yaitu dari 8,65 menjadi 4,18.

Sektor pertanian diperkirakan menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi triwulan mendatang yang didukung oleh tumbuhnya sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Masuknya musim tanam tanaman bahan makanan di triwulan mendatang diperkirakan akan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Sementara itu, dari sisi perkebunan, produksi karet diperkirakan akan meningkat sementara produksi kelapa sawit diperkirakan menurun karena memasuki siklus yang rendah di awal tahun ini. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan meningkat pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan sektor pertanian. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga diperkirakan akan mengalami peningkatan meskipun cenderung melambat di triwulan mendatang. Perdagangan besar diperkirakan akan meningkat seiring

dengan tingginya konsumsi pembelian barang tahan lama oleh masyarakat. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan terus meningkat. Pertumbuhan sektor pertambangan didukung oleh meningkatnya produksi batu bara, serta hasil penggalian sementara produksi migas yang relatif stabil. Sementara itu, pertumbuhan sektor bangunan di bulan mendatang masih meningkat yang didukung oleh meningkatnya perumahan rakyat. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia Jambi, pertumbuhan ekonomi tahunan (y-o-y) Provinsi Jambi pada triwulan I-2012 diperkirakan pada kisaran 7,25%-8,25%. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan pada kisaran 7,3%±1.

Perkembangan harga-harga pada triwulan I-2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2011 baik secara kuartalan maupun tahunan namun dengan angka yang relatif rendah. Secara tahunan, inflasi Kota Jambi pada Triwulan IV-2011 diperkirakan menurun sebesar 3,80%-4,80% (y-o-y). Pada triwulan mendatang, tekanan inflasi bersumber dari sisi permintaan maupun penawaran meskipun relatif rendah. Dari sisi permintaan, adanya libur bersama serta meningkatnya pembangunan perumahan dapat memicu angka inflasi Kota Jambi pada triwulan mendatang. Sementara itu di sisi penawaran, harga bahan makanan serta beberapa komoditi masih berada pada harga yang tinggi serta adanya kendala jalur distribusi akibat kondisi jalan yang belum baik dan musim hujan. Namun demikian, relatif rendahnya inflasi di bulan mendatang disumbangkan oleh berlangsungnya musim panen beberapa komoditi utama seperti beras sehingga harga cenderung turun.

Komoditi-komoditi yang diperkirakan mengalami peningkatan harga seiring dengan meningkatnya permintaan adalah bahan bangunan dan emas. Namun demikian, dari sisi penawaran, meningkatnya harga bahan makanan terutama cabe merah, dan daging ayam ras dapat memicu meningkatnya angka inflasi Kota Jambi sementara harga beras diperkirakan mengalami penurunan.

Beberapa faktor-faktor lain yang masih berpotensi akan memberikan tekanan inflasi selama triwulan mendatang dan menyebabkan perkiraan inflasi keluar dari sasaran antara lain 1) Meningkatnya pembangunan residensial di Jambi dapat memicu kenaikan harga barang-barang material dan jasa tukang, 2) Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa, 3) Kondisi cuaca yang memasuki musim hujan dapat menjadi ancaman dalam distribusi hasil pertanian pendistribusian barang, 4) Potensi kenaikan harga minyak mentah dunia yang dapat diikuti dengan pergerakan harga-harga komoditas bahanbahan pangan di pasar internasional. Beberapa hal tersebut diperkirakan akan memacu meningkatnya angka inflasi pada periode triwulan I tahun 2012.

Keadaan tenaga kerja di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai 1.551.000 orang pada Februari 2012, angka ini bertambah sebanyak 23,6 ribu orang dibandingkan dengan angkatan kerja pada periode yang sama tahun 2011, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi diprediksi sebanyak 1.494.400 orang pada Februari 2012 atau bertambah sebesar 25,7 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2011. Sementara jumlah penganggur pada Februari 2012 berkurang dibanding keadaan Februari 2011. Pada Februari 2012 penganggur sebesar 56,6 ribu orang berkurang 2,2 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2011 sebesar 58,8 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi pada Februari 2012 diperkirakan 3,65 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2011 sebesar 3,85 persen.

Berdasarkan status pekerjaan pada Februari 2012, penduduk yang bekerja dengan status buruh masih yang terbesar yaitu mencapai 554,7 ribu orang (37,12 persen), disusul berusaha sendiri 280,4 ribu orang (18,76 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar 270,8 ribu orang (18,12 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 221,7 ribu orang (14,84 persen). Pada Februari 2012, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sekitar 752,8 ribu orang (50,38 persen),

sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sekitar 41,3 ribu orang (2,76 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 113,9 ribu orang (7,62 persen).

Sedangkan perkembangan indikator ekonomi Provinsi Jambi pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2011

a. Infisi dan PDRB							
INDIKATOR	2010	2010		2011			
		Trw. III	Trw. IV	Trw. I	Trw. II	Trw. III	Trw. IV
MAKRO							
Indeks Harga Konsumen Kota Jambi	129,91	126,10	129,91	128,87	128,66	132,80	133,49
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Jambi	10,52	7,91	10,52	7,99	4,45	5,31	2,76
PDR - Harga Konstan (Juta Rp) ¹⁾	17.470.653	4.435.204	4.522.574	4.585.641	4.676.009	4.822.736	4.878.010
- Pertanian	5.262.856	1.328.520	1.350.454	1.366.256	1.384.595	1.411.923	1.417.451
- Pertambangan dan penggalian	2.146.442	561.162	598.163	623.013	651.673	680.378	687.233
- Industri Pengolahan	2.233.275	559.860	560.546	565.311	574.633	596.756	610.822
- Listrik, Gas dan Air Bersih	145.524	36.902	39.484	39.900	40.248	40.687	41.083
- Bangunan	835.368	212.277	214.153	216.007	219.426	223.841	228.799
- Perdagangan Hotel dan Restoran	3.046.733	780.224	789.908	798.025	815.241	857.289	870.155
- Pengangkutan dan Komunikasi	1.320.270	332.231	334.886	335.203	339.422	347.948	351.936
- Keuangan, Persawahan dan Jasa	997.305	253.610	261.653	265.088	269.382	274.778	278.649
- Jasa	1.482.880	370.418	373.327	376.838	381.389	389.136	391.882
Nilai Ekspor Non Migas (ribu USD) ²⁾	1.374.724	342.806	502.430	560.714	550.266	490.675	397.937
Volume Ekspor Non Migas (Ribu ton)	2.758.979	729.660	1.312	1.324	1.919.283	1.636.674	1.163.958
Nilai Impor Non Migas (Ribu USD) ³⁾	161.084	41.583	50.289	21.286	83.214	28.174	38.788
Volume Impor Non Migas (Ribu ton)	136	49	25	23	73	32	38
Catatan :							
1) Angka Sementara berdasarkan tahun dasar 2000							
2) Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 Kelompok barang berdasarkan SITC 2 digit yang berlaku							
3) Pengklasifikasian komoditi dalam statistik impor menggunakan SITC 2 digit							

Bertitik tolak dari kondisi indikator ekonomi daerah pada tahun 2012 yang lalu, maka untuk tahun 2013 yang akan datang rencana ekonomi makro daerah ditargetkan untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7 persen, laju inflasi sebesar indeks gini sebesar 0,252 persen, indeks williamson 0,388 persen dan penduduk diatas garis kemiskinan 93,00 persen.

3.2. Kebijakan Pendanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efesiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan

efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2012 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah.

Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2013 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada.

Dalam rangka mengupayakan target pendapatan pada tahun 2013 yang akan datang, maka mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 yang lalu, telah dilakukan langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang antara lain meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.
2. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten.
3. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Membentuk Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil pada tahun 2011 tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 (APBD Induk Tahun 2011) sebesar Rp142,26 milyar, atau terjadi peningkatan pendapatan sebesar 24,90 % dari Rp571,30 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp713,56 milyar pada tahun 2012. Namun

demikian, untuk mencapai rencana target penerimaan PAD di tahun 2013 yang akan datang, harus dilakukan dengan kerja keras seiring dengan dikeluarkannya kebijakan dari Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tentang penerapan manajemen resiko pada Bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan Rumah dan kredit kendaraan bermotor tanggal 15 Maret 2012.

Berdasarkan kebijakan tersebut, *down payment* (DP) untuk pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan ketentuan sebagai berikut.

1. DP paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
2. DP paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.
3. DP paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif.

Kebijakan lain yang juga harus diperhatikan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peningkatan pendataan pada tahun mendatang adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dimana dengan peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah sebesar 5% (lima persen), yang sebelumnya PBB-KB tersebut adalah 7,5% (tujuh koma lima persen).

Bertitik tolak dari kondisi sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan tetap mempertahankan kebijakan yang telah diambil pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 akan diambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.

2. Melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan inventarisasi kendaraan-kendaraan angkutan perusahaan yang melakukan distribusi atau oengangkutan hasil sumberdaya alam.
3. Mengefektifkan razia kendaraan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* secara periodik.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari rencana pendapatan daerah diasumsikan meningkat sebesar 8,3 persen atau 172,26 milyar yaitu dari Rp2,075 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp2,247 triliun pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan daerah tersebut, terutama didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 7,43 persen atau meningkat dari Rp605,32 milyar menjadi Rp650,32 milyar dari prediksi peningkatan penerimaan dana alokasi umum meningkat 26,71 persen atau sebesar Rp159,94 milyar dari tahun 2012 yaitu Rp598,88 milyar menjadi 758,82 milyar pada Tahun 2013, sedangkan dana alokasi khusus (DAK) belum dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah sepanjang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK tahun 2013. Target pendapatan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Rencana Pendapatan Tahun 2013

Uraian	Tahun Anggaran 2013
PENDAPATAN	2.247.593.450.318,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	758.559.311.667,00
Pendapatan Pajak Daerah	650.317.579.667,00
Hasil Retribusi Daerah	7.462.787.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.106.827.350,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.672.117.150,00
DANA PERIMBANGAN	1.146.806.538.991,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	387.987.319.686,00
Dana Alokasi Umum	758.819.219.305,00
Dana Alokasi Khusus	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	342.227.599.660,00
Pendapatan Hibah	1.199.909.660,00
Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang	341.027.690.000,00
Kontribusi diklatpim dan Prajabatan	0,00

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada ***peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam menuju Jambi Emas 2015*** sesuai dengan tema RKPD tahun 2013.

Dari sisi postur, RAPBD 2012 disusun dengan prinsip dasar optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, dengan tetap memperhatikan pemberian insentif fiskal pada kegiatan dunia usaha, yang ditopang dengan kebijakan reformasi birokrasi baik dalam bidang perpajakan maupun kepabeanan. Selain itu, berbagai upaya juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan produksi sumber daya alam, baik migas maupun nonmigas sebagai sektor pendorong penerimaan daerah bukan pajak.

Di sisi belanja Daerah, arah kebijakan alokasi anggaran dalam RKPD 2013 akan berorientasi pada upaya pencapaian visi pembangunan Jambi EMAS 2015, melalui percepatan pembangunan Infrastruktur, kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya, sektor pertanian, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan alokasi belanja dalam RKPD 2013 akan tetap didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, yang merupakan perubahan mendasar dalam proses penganggaran dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan belanja Daerah juga akan menekankan pada *outcome basis*, yang selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam hasil (*output*) dan program, serta kegiatan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional. Sebagian besar porsi belanja dalam RAPBD 2012 atau sekitar 60,29 persennya akan dialokasikan untuk belanja langsung dan digunakan untuk mendukung 5 prioritas pembangunan, yaitu: 1) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Energi; 2) Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya; 3) Pengembangan Ekonomi Rakyat, investasi dan kepariwisataan; 4) Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup (LH); 5) Penataan Tata Pemerintahan yang baik.

Dalam RKPD tahun 2013, penetapan besaran defisit anggaran mengacu pada upaya tetap terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal, serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah untuk dapat menutup defisit tersebut dari sumber-sumber pembiayaan yang tidak memberatkan di masa kini dan mendatang. Sementara itu, untuk menutup defisit tersebut diperoleh dari penerimaan pembiayaan yaitu prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp131,02 milyar.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan Jambi Emas 2015 sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan,

kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, sektor pertanian, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai itu semua, dalam Rencana APBD Tahun 2013 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp2,378 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1,230 triliun atau setara dengan 51,72 persen, sementara untuk belanja langsung sebesar Rp1.148 triliun atau setara dengan 48,28 %.

Dari total belanja tidak langsung pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp1,230 triliun yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan nasional, terutama untuk belanja pegawai dalam rangka mengantisipasi jika ada kebijakan kenaikan pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 5 persen dan tetap menganggarkan untuk tambahan penghasilan bagi PNS dengan alokasi anggaran sama dengan tahun lalu.

Disamping itu, belanja pegawai juga digunakan dalam rangka mengantisipasi pengangkatan tenaga honorer yang sesuai dengan *data base* dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi CPNS. Selanjutnya belanja pegawai juga diarahkan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Memperhatikan hal tersebut, maka pada tahun 2013 dianggarkan untuk belanja pegawai sebesar Rp479,73 milyar. Untuk belanja hibah dan bantuan sosial, pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp344,03 milyar yang terdiri dari Rp341,03 milyar merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan untuk bantuan sosial sebesar Rp3,00 milyar yang dalam penggunaannya sesuai dengan peraturan tentang hibah dan bantuan sosial.

Sementara untuk belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp265,96 milyar yang merupakan pendapatan provinsi yang menurut ketentuan merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp10 milyar dengan memperhatikan realisasi pada tahun sebelumnya. Pada dasarnya belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau dalam rangka tanggap darurat.

Tabel 3.3 Proporsi Belanja Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2008-2011

Uraian	Realisasi				2012
	2008	2009	2010	2011	
BELANJA	1.404.982.484.105,50	1.530.073.192.806,26	1.488.130.349.598	1.749.614.252.177	2.283.531.246.205
BELANJA TIDAK LANGSUNG	511.724.076.104,50	685.176.280.494,26	672.267.046.823	759.840.717.763	1.167.964.624.189
Belanja Pegawai	296.561.580.079,00	326.068.007.530,00	336.141.291.258	386.128.630.565	427.729.484.552
Belanja Subsidi	5.984.070.000,00	8.688.823.000,00	130.000.000	135.000.000	92.000.000
Belanja Hibah	3.592.607.000,00	7.438.277.500,00	64.358.880.705	22.187.375.500	341.027.690.000
Belanja Bantuan Sosial	3.282.616.600,00	22.222.754.434,00	37.191.081.892	55.988.739.100	78.065.100.000
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	198.770.202.425,50	172.865.736.421,06	222.916.085.468	291.345.987.150	231.383.149.637
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.250.000.000,00	145.217.846.609,20	9.900.000.000	929.835.448	79.667.200.000
Belanja Tidak Terduga	283.000.000,00	2.674.835.000,00	1.629.707.500	3.125.150.000	10.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	893.258.408.001,00	844.896.912.312,00	815.863.302.775	989.773.534.415	1.115.566.622.016
Belanja Pegawai	54.733.495.971,00	50.985.047.831,00	53.961.942.558	68.095.370.607	85.347.128.770
Belanja Barang dan Jasa	278.270.195.705,00	348.230.502.202,00	296.041.039.214	402.912.867.758	529.059.194.956
Belanja Modal	560.254.716.325,00	445.681.362.279,00	465.860.321.003	518.765.296.050	501.160.298.290

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA Tahun lalu. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri penyertaan modal pada penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada tahun 2011 terjadi surplus anggaran yang merupakan SiLPA Tahun berkenaan sebesar 631,82 milyar yang akan digunakan untuk kegiatan yang bersifat prioritas pada Perubahan APBD Tahun 2012. Sedangkan pada rencana alokasi APBD Tahun 2013 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 131,02 milyar atau sebesar 5,82 persen dari rencana jumlah penerimaan tahun 2013 yang dipenuhi dari Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 yang menegaskan bahwa batas maksimal 6 persen dari total penerimaan APBD.

Perhitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang.

Tabel 3.4 Kerangka Pendanaan APBD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 Menurut RPJMD (Rp Jutaan)

URAIAN	Tahun Anggaran					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Pendapatan Daerah	1,304,934	1,359,006	1,455,284	1,557,266	1,726,429	1,847,856
2. Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	200	100	90	81	72	65,61
3. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	706,676	551,309	587,945	627,095	692,325	727,873
a. Gaji Pegawai	266,976	330,785	352,767	376,257	415,395	436,724
b. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	176,271	173,268	184,783	197,087	217,588	228,76
c. Belanja Bantuan Keu Ke Kab/Kota	29,4	47,255	50,395	53,751	59,342	62,389
5. Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Priorita Utama		658,681	693,747	731,219	793,654	827,678
a. Sektor Pendidikan 20%		212,648	226,779	241,879	267,04	280,751
b. Infrastruktur		315,034	335,969	358,34	395,614	415,927
c. Program Samisake	0	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
6. Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
a. Pembentukan Dana cadangan	0	0	0	0	0	0
b. Penyertaan Modal/Investasi	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Pada kerangka pendanaan APBD Provinsi Jambi Tahun 2013, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp2,247 Triliun, pendapatan ini akan digunakan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp 479,73 milyar, belanja bagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp 265,96 milyar, belanja bantuan keuangan kabupaten/kota sebesar Rp 131 milyar dan belanja hibah 341,03 milyar. Semua belanja diatas merupakan Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat, Adapun belanja langsung yang bersifat prioritas utama sesuai dengan visi misi Gubernur 2010-2015 untuk mewujudkan Jambi Emas dialokasikan pada sektor pendidikan sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya sebesar 20 persen dari APBD, berkenaan dengan itu program tersebut merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan. Demikian juga untuk program infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan ini juga program prioritas dan utama serta program Satu Milyar Satu Kecamatan yang disebut dengan **program Samisake** merupakan program prioritas dari Gubernur yang juga akan dialokasikan pada tahun 2013 sebesar Rp 131 milyar sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Jambi dan dapat terjadi jumlah ini bisa meningkat untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan perkembangan pemekaran kecamatan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 diperkirakan sebesar 7,98 persen, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 7,19 persen dan pertumbuhan belanja langsung sebesar 5,88 persen, sehingga secara total belanja diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,19 persen pertahun selama periode 2010-2015.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dari perhitungan tersebut diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 360,18 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 7,98 persen, kemudian pertumbuhan rata-rata penerimaan sebesar Rp 7,17 persen, sedangkan total pertumbuhan rata-rata Belanja dan

Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 6,43 persen pertahun, sehingga pertumbuhan rata-rata Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar 9,57 persen pertahun untuk periode 2011-2015. Dari gambaran kemampuan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan relative kecil yaitu dari sebesar Rp 360,18 milyar tahun 2011 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar tahun 2015. Berkenaan dengan itu perlu pengawasan yang lebih proaktif dalam menjalankan semua program wajib dan prioritas yang telah dijanjikan pada rakyat.

Jika dilihat dari rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 360,18 milyar, tahun 2012 sebesar Rp 393,15 milyar, tahun 2013 sebesar Rp 428,39 milyar dan tahun 2014 sebesar 487,09 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 519,09 milyar atau diprediksi meningkat rata-rata sebesar 7,98 persen. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang program wajib dan program prioritas selama tahun 2010-2015 mendatang. Pemilihan program dan kegiatan ini harus benar-benar mampu mendorong program prioritas dan program utama untuk mewujudkan Jambi Emas melalui *triple track plus one* yaitu **pro poor**, **pro job** dan **pro growth** serta **pro environment**.

Tabel 3.5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 (Rp Jutaan)

No	URAIAN	Tahun Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	360,178	393,151	428,385	487,092	519,086
II	Total Rencana Prioritas Pengeluaran I (II.a-II.b-II.c)	265	285	325	370	400
II.a	Belanja langsung Dikurangi	923,681	978,747	1,056,219	1,163,654	1,227,678
II.b	Belanja Langsung Periodik yg wajib dan mengikat serta prioritas utama	658,681	693,747	731,219	793,654	827,678

No	URAIAN	Tahun Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	360,178	393,151	428,385	487,092	519,086
II.c	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta Prioritas Utama	10	10	10	10	10
	Sisa Kapasitas riil Kemampuan Keuangan daerah Setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	95,178	108,151	103,385	117,092	119,086
III	Rencana Prioritas Pengeluaran II (III.a-III.b)	16,5	19	20	22,5	30
III.a	Belanja Tidak Langsung Dikurangi	567,809	606,945	647,095	714,825	757,873
III.b	Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	551,309	587,945	627,095	692,325	727,873
	Surplus Anggaran Riil (I - II - III)	78,678	89,151	83,385	94,592	89,086